

**Implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan
Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada
Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)**

**Implementation of Determination of Pilot Environmental Areas for
Community Awareness of Population Administration (Case Study in
Semolowaru Village, Sukolilo District, Surabaya City)**

Winda Kartika Sari¹, Weni Rosdiana²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: winda.20038@mhs.unsa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan melalui RT Rintisan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kalimasada di Kelurahan Semolowaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan lembar observasi. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan, komunikasi antar organisasi, sikap (disposisi), lingkungan ekonomi, sosial, politik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan target pencapaian belum terpenuhi karena rendahnya partisipasi masyarakat dan kurang efektifnya layanan RT rintisan. Adanya keterbatasan sumber daya seperti sarana dan prasarana pada balai RW tidak adanya web cam dan komputer yang sering error menyebabkan keluhan warga tentang pelayanan yang lambat. Karakteristik badan pelaksana di Kelurahan Semolowaru termasuk DispendukCapil Surabaya, serta Ketua RT menunjukkan kemampuan dalam mengelola administrasi kependudukan. Komunikasi antar organisasi memberikan sikap positif dan motivasi yang tinggi dari pelaksana. Koordinasi antara Kelurahan dan RT rintisan cukup efektif, meskipun beberapa RT menghadapi tantangan responsivitas warga. Sikap (disposisi) yang positif dan profesional pelaksana, termasuk staff administrasi dan ketua RT rintisan, namun beberapa ketua RT kurang responsif dan ada ketidakpatuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat di perumahan besar kurang responsif karena lebih memprioritaskan pekerjaan, sementara warga di perumahan menengah tetap kooperatif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi Kalimasada belum optimal dalam capaian target di bawah capaian yang sudah ditentukan serta ketidakaturan administrasi di beberapa wilayah. Saran yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan bagi petugas administrasi, sosialisasi program kepada masyarakat dan perbaikan sistem manajemen administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Implementasi, Kalimasada

Abstract

The Surabaya City Government launched the Neighborhood Determination Program for Aware Population Administration (Kalimasada) to facilitate community access to civil registration through RT Rintisan. This research aims to describe and analyze Kalimasada implementation in Semolowaru Village using qualitative descriptive methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Research instruments used were interview guides and observation sheets. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study focused on six indicators: policy size and objectives, resources, organizational characteristics, inter-organizational communication, attitudes (disposition), and economic, social, and political environment. Findings indicate that targets for policy size and objectives have not been met due to low community participation and ineffective RT Rintisan services. Limited resources such as inadequate facilities at the RW Office—lacking webcams and error-prone computers—resulted in complaints about slow service. Organizational characteristics of Semolowaru Village, including the Surabaya Civil Registry Office (DispendukCapil) and RT chiefs, demonstrate capability in managing civil registration. Inter-organizational communication fosters positive attitudes and high motivation among staff. Coordination between the Village and RT Rintisan is generally effective, although some RTs face challenges in responsiveness. While staff exhibit positive and professional dispositions, some RT chiefs are less responsive, and community compliance with civil registration remains an issue. Economic, social, and political factors in larger housing areas contribute to lower responsiveness compared to cooperative attitudes in medium-sized housing. In conclusion, Kalimasada implementation falls short of predetermined targets and exhibits administrative irregularities in some areas. Recommendations include enhanced training for administrative staff, community program awareness, and improvements in civil registration management systems.

Keywords : Population Administration, Kalimasada, Implementation

Pendahuluan

Kebijakan merupakan salah satu alat yang signifikan dalam penanggulangan berbagai masalah sosial. Masalah-masalah yang melibatkan komunitas secara luas sering kali terkait dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diinisiasi oleh pemerintah haruslah mempertimbangkan berbagai isu aktual yang relevan. Kebijakan ini pada dasarnya adalah keputusan atau arah tindakan yang secara tidak sengaja mengatur bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia dikelola dan distribusikan untuk kepentingan umum, yaitu keseluruhan masyarakat. Masyarakat atau warga negara serta penduduk. Kebijakan publik melibatkan pihak-pihak terkait, terutama dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik adalah tahap operasional yang umumnya dilaksanakan setelah kebijakan dibentuk. Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat, kebijakan tersebut harus dijalankan melalui serangkaian langkah yang beragam (Agindawati, 2019). Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dengan metode yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Pramono, 2020). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam rangkaian kebijakan dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan.

Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan memiliki peran strategis dalam administrasi kependudukan serta menyediakan data-data kependudukan yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Pentingnya administrasi kependudukan dimana data populasi menjadi dasar dalam keputusan strategis di lingkungan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia mengambil upaya dalam perumusan kebijakan demografis kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan dimana hal itu sangat bergantung pada akurasi data kependudukan. Kebijakan yang telah dikeluarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013) diharapkan pada proses pengelolaan administrasi kependudukan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Kebijakan kependudukan merupakan strategi yang bertujuan untuk mengubah komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan populasi (Widyaningtyas, 2023). Hal ini melibatkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu yang meliputi pengaruh dan karakteristik demografis penduduk. Kependudukan merupakan hal utama dalam persoalan pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar serta memiliki tantangan dalam mengelola administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menjadi landasan krusial dalam mengumpulkan, menyusun dan mengelola informasi mulai distribusi dan karakteristik penduduk di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Menurut (Kemendagri, 2018) Administrasi Kependudukan yaitu serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Implementasi pada administrasi kependudukan yang efisien, efektif dan transparansi menjadi landasan kebijakan publik, pembangunan, serta pelayanan publik.

Administrasi kependudukan berperan penting bagi aktivitas kehidupan di Indonesia. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam serangkaian kegiatan penataan dan pengendalian serta penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan pelayanan publik yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia, itu semua merupakan bagian dari pelayanan publik. Pemerintah Indonesia berperan sangat besar dalam pelayanan publik. Pelayanan Publik berbasis teknologi digital pada dasarnya telah dilakukan di Indonesia semenjak mempraktikkan pemerintah berbasis digital. Pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan yang mudah dijangkau, sehingga suatu birokrasi harus membuat dan menerapkan pemberian pelayanan yang baik dalam sebuah Pemerintahan.

Masyarakat diwajibkan selalu melaporkan dan mencatatkan setiap peristiwa penting atau dokumen administrasi kependudukan yang dialami sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 3 UU No.23 Tahun 2006. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup padat serta masih banyak masyarakat khususnya

Kelurahan Semolowaru yang belum tertib terkait pentingnya administrasi kependudukan dan pembaruan dokumen administrasi kependudukan membuat adanya permasalahan yang timbul di lingkungan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo. Pada Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo masih terdapat masyarakat yang mengabaikan dokumen administrasi kependudukan, yang enggan memperbarui dokumen administrasi dan lebih memilih untuk mengurus langsung di Kelurahan terdekat ketika dibutuhkan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Capaian Kalimasada.

NO	KELURAHAN	NAMA		TARGET PADA AKUN RT KALIMASADA								
		WINDA KARTIKA SARI		BELUM REKAM BARU/SUDAH SURVEY	DIDUGA TIDAK DIKETAHUI	DIDUGA PINDAH LUAR KOTA	DIDUGA MENINGGAL	CAPAIAN	BELUM REKAM BARU/SUDAH SURVEY	DIDUGA TIDAK DIKETAHUI	DIDUGA PINDAH LUAR KOTA	DIDUGA MENINGGAL
		RW	RT									
1	SEMOLOWARU	a	01	02	100%	0%	0%	25%	6	6	0	50
		b	02	03	0%	0%	-	7%	0	2	0	7
		c	03	02	100%	0%	-	56%	7	7	0	30
		d	04	04	0%	0%	0%	25%	0	1	0	0
		e	05	01	0%	0%	0%	25%	0	1	0	2
		f	06	06	0%	0%	0%	0%	0	1	0	2
		g	07	02	0%	0%	0%	25%	0	3	0	2
		h	08	02	100%	0%	0%	30%	0	3	0	0
		i	09	03	0%	0%	-	0%	0	5	0	0
		j	11	01	0%	0%	0%	0%	0	3	0	19
		k	12	03	0%	0%	-	0%	0	1	0	0
									0	0	0	0

Keterangan
 Data yang sudah di survey
 Data yang ada di web Kalimasada

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan capaian Kalimasada pada gambar diatas bahwa capaian masih belum mencapai target nilai yang sudah ditentukan dan masih dibawah nilai capaian. Pada capaian tersebut yang paling banyak tidak memenuhi target pada akun RT Kalimasada adalah RT 06 RW 06, RT 01 RT 09 , RW 09 dan RT 01 RW 11 RT 03 RW 12, berdasarkan angka capaian Kalimasada yang berada di Kelurahan Semolowaru yaitu 0%. Pihak Kelurahan akan kesulitan dalam mendata dan melaporkan serta melacak jejak dokumen kependudukan yang telah lama tidak diperbarui atau baru saja mengurus. Program Kalimasada apabila berjalan dengan baik dan data kependudukan valid, maka ketika Pemerintah Kota Surabaya melakukan intervensi akan lebih tepat sasaran. Baik dari intervensi masalah kemiskinan, maupun anak putus sekolah. Dari data diatas menunjukkan bahwa data Kalimasada belum valid, serta masih banyak masyarakat Kota Surabaya khususnya Kelurahan Semolowaru tidak diketahui keberadaannya. Hal itu membuat Pemerintah Kota Surabaya kesulitan dalam melakukan intervensi. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Suarabaya telah menerapkan digitalisasi layanan dokumen administrasi kependudukan dengan baik dan inovatif, yang telah dimanfaatkan dengan optimal (Dispenduk, 2024). (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, 2021) Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, 2021) Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Linkungan Pemerintah Daerah telah diatur untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengeluarkan beberapa inovasi dalam pelayanan publik khususnya mengenai administrasi kependudukan salah satunya Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) yang diluncurkan pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021 tentang Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya (Romadhona & Nawangsari, 2023). Masyarakat Kota Surabaya khususnya Kelurahan Semolowaru tidak diketahui keberadaannya. Hal itu membuat Pemerintah Kota Surabaya kesulitan dalam melakukan intervensi. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Suarabaya telah menerapkan digitalisasi layanan dokumen administrasi kependudukan dengan baik dan inovatif, yang telah dimanfaatkan dengan optimal (Dispenduk, 2024). (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah, 2021) Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Linkungan Pemerintah Daerah telah diatur untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengeluarkan beberapa inovasi dalam pelayanan publik khususnya mengenai administrasi kependudukan salah satunya Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) yang diluncurkan pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021 tentang Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya (Romadhona & Nawangsari, 2023).

Kalimasada merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang mengimplementasikan proses administrasi kependudukan menggunakan aplikasi dan website yaitu KNG (Klampid New Generation). Inovasi lain pelayanan administrasi kependudukan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya salah satunya aplikasi KNG dimana aplikasi ini sangat membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara online terkait layanan faskes, pelayanan umum, pemutakhiran data kependudukan, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk. Masyarakat dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan melalui web klampid ataupun aplikasi KNG secara mandiri tanpa harus datang ke DispendukCapil Kota Surabaya, serta masyarakat yang kurang paham dengan teknologi juga dapat mengurus administrasi kependudukan melalui RT rintitisan terdekat secara gratis. Program penetapan perintisan Kalimasada dilaksanakan oleh 31 Kecamatan yang terdiri dari 154 Kelurahan di Kota Surabaya. Salah satu wilayah administratif yang aktif dalam menerapkan program Kalimasada adalah Kecamatan Sukolilo.

Wilayah ini terbagi menjadi tujuh bagian Kelurahan termasuk Kelurahan Semolowaru, Nginden Jangkungan, Menur Pumpungan, Klampid Ngasem, Gebang Putih, Keputih dan Medokan Semampir. Pemerintah Kota Surabaya mencoba upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Surabaya dengan meluncurkan inovasi program Kalimasada melalui Aplikasi KNG (Klampid New Generation), sehingga memungkinkan warga memenuhi kebutuhan tanpa perlu datang langsung ke Kelurahan. Aplikasi KNG (Klampid

New Generatin) memanfaatkan jaringan internet yang mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Surabaya. Adanya Aplikasi KNG (Klampid New Generation) diharapkan dapat mudah untuk dilaksanakan oleh warga Surabaya khususnya Kelurahan semolowaru karena dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Warga yang tidak memiliki akses internet, orang tua yang kurang memahami teknologi dapat mengurus dokumen administrasi kependudukannya melalui RT sebagai RT rintisan Kalimasada yang ada di kelurahan Semolowaru atau dapat mengunjungi balai RW terdekat yang sudah difasilitasi seperti komputer, printer, wafi gratis dan juga cctv untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kelurahan Semolowaru terdapat 12 RT Kalimasada. Implementasi Program Kalimasada pada Kelurahan Semolowaru yang pelaksanaannya kurang efektif yaitu RT 03 RW 12 karena masih menerapkan perbedaan kesenjangan sosial dan kurangnya sosialisasi dari RT setempat kepada masyarakat yang berada di lingkungan RW 12.

Metode

Penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena fokusnya adalah untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang realitas yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tanpa melakukan pengukuran kuantitatif, melainkan lebih menitikberatkan pada pemahaman serta interpretasi mendalam terhadap konteks dan aspek-aspek kualitatif yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh informan yaitu seorang atau beberapa orang sebagai hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021 tentang Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Pertimbangan tersebut mungkin meliputi pengetahuan yang dimiliki informan tentang topik penelitian atau perannya dalam situasi yang diteliti, yang akan memfasilitasi peneliti dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung bersama narasumber yang terlibat yaitu

- a. Kasi Pmerintahan Kelurahan Semolowaru,
- b. Staf layanan administrasi kependudukan,
- c. Ketua RT 06 RW 06 Kelurahan Semolowaru,
- d. serta Masyarakat Kelurahan Semolowaru.

Dalam analisisnya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn, berfokus pada enam indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap (disposisi), lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi Kantor Kelurahan Semolowaru di Jl. Semolowaru No 160, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

60119 sebagai tempat penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan publik menurut Abdul Wahab (2008) dalam (Entjaurau et al., 2021) Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan resmi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang saling berkaitan dan berdampak pada banyak anggota masyarakat. Menurut definisi itu, sebuah kebijakan publik harus memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Pada program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dapat dilihat sebagai kebijakan publik, karena merupakan tindakan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian suatu masalah. Pemerintah Kota Surabaya menciptakan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan sesuai dengan aturan (Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021, 2021) Tentang Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya. Dalam mengevaluasi keberhasilan program Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru, Kota Surabaya, digunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Metter & Van Horn. Model implementasi kebijakan Van Metter Van Horn terdapat enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, sikap / kecenderungan para pelaksana (disposisi), lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setiap indikator yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn akan dianalisis melalui aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan konteks sosial-kultur di tingkat pelaksana. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan di tingkat masyarakat sulit direalisasikan, maka mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik menjadi lebih menantang. Untuk memastikan implementasi yang lancar, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan dan ukuran yang jelas sehingga tidak ada perbedaan interpretasi di antara para pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya menunjukkan bahwa meskipun program Kalimasada bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan menciptakan lingkungan yang tertib administrasi kependudukan, dalam implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan yaitu nilai mencapai target 100% namun pada realisasinya masih di bawah 60%. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya

terkait Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan, Ketua RT rintisan ditunjuk sebagaimana pelaksana utama pada program Kalimasada. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Staff Layanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo,, Kota Surabaya terungkap bahwa ada sejumlah RT rintisan ketidakefektifan dalam implementasi Kalimasada di beberapa RT. Mayoritas masyarakat masih memilih untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan langsung ke kantor Kelurahan Semolowaru dari pada melalui RT rintisan Kalimasada yang ada di masing-masing RT sehingga mengabaikan peran RT sebagai perintisan adminstrasi. Meskipun tujuan kebijakan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan adminstrasi kependudukan sudah terdefinisi dengan baik, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Faktor ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keberadaan program Penetapan Perintisan Kalimasada, serta belum optimalnya penggunaan aplikasi KNG oleh sebagian Ketua RT.

Pada pelaksanaan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan khususnya di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, kota Surabaya dengan menggunakan aplikasi Klampid New Generation (KNG) untuk mendukung proses implementasi program Kalimasada, beberapa Ketua RT rintisan seperti yang terlihat pada RT 06 RW 06, menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan akun Kalimasada dan aplikasi KNG. Berdasarkan wawancara dari ketua RT 06 RW 06 penggunaan aplikasi KNG maupun Kalimasada jarang digunakan sampai terlupakan akun Ketua RT tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada realisasi implementasi program ini masyarakat lebih cenderung jika mengurus dokumen kependudukan langsung ke Kantor Kelurahan dari pada ke RT rintisan Kalimasada. Oleh karena itu pemegang akun Kalimasada yang aktif di pegang oleh Staff dari Kelurahan hingga RT rintisan kurang maksimal dalam pengimplementasian Kalimasada yang menyebabkan capaian Kalimasada di Kelurahan Semolowaru masih di bawah target capaian Kalimasada yang telah ditentukan, sehingga tujuan dari program tersebut kurang terealisasi dengan baik. Pada wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima Kalimasada di Wilayah RT 01 RW 05 menunjukkan masih terdapat ketidakpahaman mengenai tujuan utama program Penetapan Perintisan Kalimasada, meskipun ada pelayanan di Balai RW kurangnya informasi dan sosialisasi membuat warga tidak merasakan dampak signifikan dari program Penetapan Perintisan Kalimasada. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih baik dan penyebaran informasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan pasrtisipasi warga dalam program Kalimasada.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, bahwa sosialisasi dan pemahaman mengenai program Penetapan Perintisan Kalimasada perlu ditingkatkan di tingkat RT. Secara keseluruhan, meskipun ukuran dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasi dilapangan menghadapi beberapa

kendala. Masyarakat Semolowaru masih cenderung lebih memilih mengurus dokumen langsung di Kantor Kelurahan karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pelaksanaan Kalimasada. Pada implementasi Kalimasada yang dilakukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, masih memerlukan perbaikan agar dapat mencapai target yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, dimana sumber daya manusia memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Pada tahap-tahap tertentu dalam proses implementasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan persyaratan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Adanya kompetensi dan kapabilitas yang memadai dari sumber daya manusia, kinerja kebijakan akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, ada sumber daya lain yang perlu diperhitungkan, yaitu sumber daya finansial dan waktu. Meskipun terdapat sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel, jika dana tidak tersedia atau tidak mencukupi, tujuan kebijakan sulit direalisasikan. Demikian pula, meskipun sumber daya manusia bekerja keras dan dana mengalir dengan baik, kendala waktu yang terlalu ketat dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan staff layanan administrasi kependudukan Kelurahan Semolowaru, Kota Surabaya dan Ketua RT 06 RW 06 Kelurahan Semolowaru, Kota Surabaya, sumber daya manusia di Kelurahan Semolowaru dinilai memadai dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terkait implementasi kebijakan Penetapan Perintisan Kalimasada. Namun, masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana di balai RW, dimana kekurangan fasilitas seperti webcam dan masalah teknis pada komputer dapat memperlambat proses pelayanan serta sumber daya waktu sebagai Ketua RT rintisan yang kurang maksimal dalam implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada.

Masyarakat Kelurahan Semolowaru mengeluh terkait layanan administrasi kependudukan yang sering mengalami keterlambatan waktu yang lebih lama dalam mengurus dokumen kependudukan, karena tidak adanya webcam saat mau mengambil foto warga untuk proses implementasi Kalimasada dalam aplikasi KNG yang terhubung dalam komputer balai RW, sehingga proses tersebut menghambat jalannya proses implementasi kebijakan Kalimasada. Pada sumber dana juga merupakan aspek penting yang mendukung implementasi program Kalimasada. Berdasarkan wawancara dari hasil penelitian pada indikator Sumber Daya, dana yang dialokasikan untuk program Penetapan Perintisan Kalimasada dianggap cukup untuk menunjang pelaksanaan program. Pada implementasinya ada keterbatasan terkait dana spesifik yang diketahui oleh masyarakat, seperti yang diungkap oleh Sovia selaku warga Semolowaru yang tidak mengetahui adanya program Kalimasada. Dana yang ada sudah mencukupi untuk membayar gaji bulanan petugas dan operasional program.

Program pelayanan malam atau Sayang Warga yang diinisiasi oleh DispendukCapil Kota Surabaya telah memberikan solusi efektif bagi warga yang sulit mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Penetapan Perintisan Kalimasada, kendala teknis dan kebutuhan akan sarana yang lebih lengkap di balai RW perlu segera diatasi. Dengan peningkatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Semolowaru dapat lebih mudah dan efisien mengakses layanan administrasi kependudukan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, kota Surabaya terkait sumber daya manusia dan waktu sudah mengalami kemajuan yang signifikan sedangkan sumber dana terkait sarana dan prasarana khususnya di Balai RW masih mengalami kekurangan yang menyebabkan banyak warga mengeluh karena layanan yang lama dalam penanganan. Perbaikan sarana dan prasarana di Balai RW sangat diperlukan dalam keberhasilan program Kalimasada.

3. Karakteristik Pelaksana

Agen pelaksana mencakup organisasi formal dan informal yang akan berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang sesuai dan tepat. Sebagai contoh, untuk kebijakan publik yang bertujuan mengubah perilaku, pelaksanaannya harus memiliki profesionalisme dan kemampuan akademik yang baik dalam program kebijakan tersebut. Selain itu, luasnya cakupan wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan dalam menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, semakin besar pula jumlah agen pelaksana yang perlu dilibatkan. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan program ini didorong oleh kompetensi agen pelaksana serta kerjasama yang baik antara organisasi formal dan informal yaitu Kelurahan Semolowaru dan DispendukCapil Kota Surabaya. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak termasuk staff layanan administrasi kependudukan, Ketua RT dan masyarakat setempat, terungkap bahwa agen pelaksana dari Kelurahan Semolowaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta Ketua RT rintisan telah menunjukkan kompetensi yang cukup dalam menangani dokumen kependudukan sesuai dengan SOP Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2019.

Para agen pelaksana ini telah menerima edukasi, bimbingan dan sosialisasi mengenai program Penetapan Perintisan Kalimasada dan penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG), yang membantu mereka puas dengan layanan yang diberikan, menilai petugas Administrasi kependudukan dan ketua RT menunjukkan sikap yang ramah serta kompeten dalam memberikan solusi terkait permasalahan administrasi kependudukan. Dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya, melalui DispendukCapil Kota Surabaya dalam bentuk penunjukan RT rintisan di setiap RW serta penyediaan sosialisasi dan bimbingan yang berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat untuk

menyukseskan program ini. Pada beberapa wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait indikator karakteristik agen pelaksana salah satu masyarakat Semolowaru yang tidak mengetahui program Penetapan Perintisan Kalimasada mengungkapkan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai pelaksana program tersebut, informasi yang masyarakat ketahui hanya sebatas semua staf layanan administrasi kependudukan di Kelurahan Semolowaru yang terlibat dalam program tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas secara keseluruhan, keberhasilan program Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, kota Surabaya Secara keseluruhan, karakteristik agen pelaksana pada implementasi kebijakan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru menunjukkan kompetensi yang cukup dalam menangani dokumen kependudukan sesuai SOP Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2019. Agen pelaksana telah memperoleh edukasi, bimbingan, dan sosialisasi mengenai program Kalimasada serta penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG). Kerjasama antara organisasi formal dan informal tercapai, dengan pelaksana dari berbagai tingkatan bekerja sama secara efektif. Masyarakat puas dengan layanan Kalimasada, menilai bahwa petugas administrasi kependudukan di Kelurahan Semolowaru ramah dan kompeten. Dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui DispendukCapil, dengan menunjuk RT rintisan dan memastikan adanya sosialisasi serta bimbingan berkelanjutan, menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan program. Keberhasilan program didorong oleh kompetensi agen pelaksana, kerjasama yang baik, serta dukungan dan kepuasan masyarakat. Meskipun ada warga yang kurang mengetahui secara spesifik siapa yang melaksanakan program, umumnya masyarakat tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Implementasi yang luas dan menyeluruh, didukung oleh bimbingan dan sosialisasi memadai, menjadi faktor utama keberhasilan program di Kelurahan Semolowaru

4. Komunikasi antar Organisasi

Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme penting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, begitupun sebaliknya. Implementasi kebijakan Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya melibatkan Kelurahan Semolowaru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Ketua RT rintisan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif di antara para pelaksana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, terlihat bahwa koordinasi dan komunikasi antara agen pelaksana berjalan dengan efektif. Menurut staff layanan administrasi kependudukan Kelurahan Semolowaru, komunikasi antara Kelurahan dengan RT rintisan Kalimasada berlangsung dengan

baik, meskipun beberapa RT rintisan seperti RT 03 RW 12, RW 11 RT 01, RT 11 RW 01 menghadapi tantangan responsivitas warga terhadap layanan Administrasi kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintah Kelurahan Semolowaru juga menyatakan bahwa komunikasi dalam program Kalimasada telah efektif sejak tahap sosialisasi awal hingga pelatihan bagi RT rintisan. Pada RT rintisan khususnya RT 03 RW 12, RT 03 RW 09, RT 11 RW 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo responsivitas yang dilakukan kurang efektif dalam implementasi Kalimasada sehingga RT rintisan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam wawancaranya RT rintisan yang tidak berjalan staff Kelurahan sudah melakukan koordinasi dan komunikasi melalui WhatsApp dan pertemuan secara langsung oleh Ketua RT tersebut, namun Ketua RT tersebut jarang merespons karena aktivitasnya yang terlalu padat dan masyarakat di sana juga mementingkan kesibukannya sehingga implementasinya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu Staff layanan administrasi kependudukan yang berperan aktif dalam implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada di RT tersebut.

Ketua RT 06 RW 06 menegaskan bahwa komunikasi di RT-nya berjalan baik dengan komunikasi menggunakan grup WhatsApp dan pertemuan langsung, meskipun beberapa warga mungkin kurang responsif karena kesibukan mereka. Dalam wawancara bersama masyarakat RT 01 RW 01 mengkonfirmasi bahwa koordinasi antara Kelurahan dan Ketua RT berlangsung efektif, meskipun beberapa warga cenderung malas membaca informasi di grup WhatsApp. Berdasarkan wawancara oleh Sovia selaku warga RT 01 RW 05 Kelurahan Semolowaru, dijelaskan bahwa komunikasi antara RT dan staf Kelurahan Semolowaru dinilai cukup komunikatif dan informatif, namun masyarakat kurang mengetahui sosialisasi tentang program Penetapan Perintisan Kalimasada. Informasi mengenai dokumen kependudukan biasanya disampaikan oleh petugas KSH melalui perkumpulan Ibu-Ibu PKK, tetapi tidak semua Ibu-Ibu di Kelurahan Semolowaru dari setiap RT dan RW mengikuti kegiatan tersebut, sehingga sebagian warga tidak begitu mengetahui informasi yang disampaikan, khususnya pada program Kalimasada. Masyarakat menyoroti bahwa, meskipun ada upaya komunikasi yang baik dari pihak RT dan staf Kelurahan, informasi mengenai program Kalimasada tidak merata diterima oleh seluruh warga. Sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan Ibu-Ibu PKK tidak menjangkau semua warga, mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang program ini. Komunikasi terkait informasi Kalimasada juga sering dilakukan melalui kegiatan PKK, namun tidak semua warga mengikuti kegiatan PKK sehingga informasi tidak merata diterima oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada upaya komunikasi yang baik, tantangan dalam meratakan informasi kepada semua warga menjadi perhatian yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program Kalimasada di Kelurahan Semolowaru.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan koordinasi dan komunikasi antar organisasi dalam implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota

Surabaya relatif efektif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan responsivitas dan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya pada RT rintisan yaitu RT 03 RW 12, RT 03 RW 09, RT 11 RW 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo. Diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan personal untuk memastikan informasi terkait administrasi kependudukan tersampaikan dengan baik dan mendorong kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam implementasi Kalimasada.

5. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan yang diterapkan mungkin tidak selalu mencerminkan pemahaman mendalam terhadap masalah dan kebutuhan lokal yang dirasakan oleh masyarakat. Respons yang diberikan oleh pelaksana terhadap kebijakan akan berdampak langsung pada proses implementasi, termasuk dalam konteks implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, kota Surabaya.

Pelaksanaan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menunjukkan bahwa sikap dan disposisi para pelaksana memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program Kalimasada. Menurut staff layanan administrasi kependudukan dalam wawancaranya sikap profesional dalam menjalankan tugas mereka dengan menggunakan aplikasi KNG secara efektif untuk mendukung target capaian Kalimasada dan mengarahkan masyarakat ke arah kepatuhan administrasi kependudukan. Sikap positif ini, didukung oleh motivasi tinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal, menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi program di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.

Para pelaksana program, baik dari staff layanan administrasi kependudukan maupun Ketua RT rintisan, menunjukkan sikap yang ramah dan penuh rasa hormat dalam melayani masyarakat. Mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada dengan sikap yang positif. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya keterlibatan beberapa RT dalam implementasi, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi aktif masyarakat, namun demikian terdapat juga beberapa catatan terkait sikap pelaksana yang perlu diperbaiki. Beberapa Ketua RT di sejumlah wilayah Kelurahan Semolowaru menunjukkan kurangnya responsivitas dalam sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat terkait program Kalimasada. Dalam wawancara kepada Ketua RT 06 RW 06 Kelurahan Semolowaru, menekankan pentingnya sikap baik dan respons positif dari pelaksana dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Sikap proaktif mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat melalui media sosial telah membantu mengatasi berbagai hambatan selama pelaksanaan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada. Meskipun tidak terdapat keluhan secara umum terhadap sikap tidak ramah dari petugas, penting untuk terus memperbaiki komunikasi dan responsivitas mereka, serta memastikan bahwa setiap warga dapat merasakan pelayanan yang merata dan

berkualitas baik.

Sikap sopan dan ramah dari petugas kelurahan dan Ketua RT sangat dihargai oleh masyarakat Semolowaru. Masyarakat merasa layanan administrasi kependudukan yang mereka terima memuaskan, meskipun masih ada tantangan terkait pemahaman teknologi di kalangan tertentu. Upaya edukasi yang terus menerus dari pelaksana membantu memperlancar proses administrasi kependudukan dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Pada wawancara oleh masyarakat yang tidak mengetahui program Kalimasada menegaskan bahwa sikap para staf layanan administrasi di Kelurahan Semolowaru sangat ramah dan baik dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan pengalaman masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap positif dan profesionalisme para pelaksana, baik dari staf layanan administrasi maupun Ketua RT rintisan, sangat mempengaruhi keberhasilan program Kalimasada. Komunikasi yang efektif dan sikap pelayanan yang ramah serta sopan dari petugas sangat berkontribusi dalam mencapai sasaran program dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kendala terkait responsivitas dan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, upaya edukasi yang dilakukan oleh petugas membantu memperlancar proses administrasi kependudukan. Sikap positif dan motivasi tinggi dari pelaksana terbukti sangat penting dalam keberhasilan program Kalimasada dan pencapaian tujuan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik, termasuk sumber daya ekonomi, dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekonomi. Faktor eksternal ini bisa mendorong atau menghambat implementasi kebijakan dari program Penetapan Perintisan Kalimasada di lingkungan Kelurahan Semolowaru. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, ditemukan bahwa kondisi ekonomi dan sosial masyarakat berperan penting dalam keberhasilan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada. Dari wawancara yang dilakukan oleh staff layanan administrasi kependudukan Kelurahan Semolowaru mengungkapkan bahwa masyarakat kelas atas di Semolowaru cenderung kurang responsif terhadap implementasi program Penetapan Perintisan Kalimasada karena lebih mengutamakan pekerjaan daripada urusan administrasi kependudukan. Akibatnya, beberapa RT tidak menjalankan program implementasi Kalimasada dengan efektif diantaranya yaitu RT 01 RW 11, RT 03 RW 12, RT 03 RW 09. Dukungan dari kepala Kelurahan semolowaru yang baru menjabat ditahan 2023, asih ada tantangan. Dalam mengajak masyarakat kelas atas atau lingkungan perumahan elit untuk lebih

responsif terhadap kemajuan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru.

Pada RT 06 RW 06 warganya termasuk kelas menengah atas, mereka tetap kooperatif dan sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi kurang responsif terhadap implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada. Perbedaan respons antara warga perkampungan yang sangat mendukung terkait kemajuan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada dan warga perumahan besar yang kurang peduli terhadap dokumen administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari lingkungan perkampungan dan perumahan. Pada RT rintisan yaitu RT 01 RW 11, RT 03 RW 12, RT 03 RW 09 implementasi Penetapan perintisan Kalimasada tidak berjalan dengan efektif dan kurang responsif dalam mengurus administrasi kependudukan. Hal ini kan menyulitkan staf layanan administrasi kependudukan dalam menjalankan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada.

Pada RT rintisan tersebut juga kurang responsif dalam kunjungan staff layanan administrasi kependudukan terkait mengimplementasikan Penetapan Perintisan Kalimasada sering dilakukan penolakan sehingga kurang jelas dan tidak valid dokumen kependudukannya. Kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat di RT tersebut “di duga tidak diketahui” dalam arti masyarakat yang tinggal di RT tersebut banyak yang tidak melapor kepada RT-nya jika pindah rumah dan tidak mengurus dokumen administrasinya. Hal ini akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh dalam ketidakpatuhan terkait dokumen kependudukan Negara Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti perbedaan respons antara warga perkampungan dan warga perumahan besar. Di wilayah perkampungan, seperti RT 01 RW 01, masyarakat sangat mendukung program Kalimasada dan memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang valid, terutama untuk keperluan bantuan sosial dan administratif lainnya. Namun, di wilayah perumahan besar, sebagian warga kurang peduli terhadap administrasi kependudukan dan kurang tanggap jika ada pihak kelurahan yang datang, karena merasa mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara keseluruhan menegaskan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial yang beragam mempengaruhi respons masyarakat terhadap program Kalimasada. Lingkungan ekonomi yang lebih tinggi sering kali menyebabkan kurangnya responsivitas terhadap administrasi kependudukan, sementara di lingkungan dengan ekonomi yang lebih rendah atau menengah, masyarakat lebih kooperatif dan tertib dalam mengurus administrasi kependudukan. Kondisi lingkungan yang kondusif dapat mendorong keberhasilan program, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi Kalimasada. Oleh karena itu, pendekatan langsung kepada masyarakat dan partisipasi

aktif dari semua elemen kelurahan, termasuk Kepala Lurah dan Ketua RT, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang signifikan dalam proses penelitian wawancara pada RT 01 RW 11, RT 03 RW 09, dan RT 03 RW 12 di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Berdasarkan informasi dari staf Kelurahan salah satu kendala utama adalah penolakan responden untuk diwawancarai yang menyebabkan data yang diperoleh kurang representatif. Banyak responden menolak karena ketidakpercayaan terhadap penelitian dan kekhawatiran mengenai privasi, selain itu kesulitan dalam menghubungi responden juga menjadi hambatan yang signifikan. Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan penjadwalan wawancara seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Faktor sosial ekonomi turut mempengaruhi penelitian ini, terutama di perumahan elit seperti RT 03 RW 12, dimana sebagian warga yang kurang responsif karena lebih fokus pada pekerjaan dan kegiatan pribadi lainnya. Mengatasi keterbatasan ini di masa mendatang, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada warga mengenai tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan yang lebih personal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan RT rintisan, serta peningkatan fasilitas penelitian. Memahami dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta menghasilkan data yang lebih akurat dan representatif.

Penutup

1. Kesimpulan

Implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya merupakan inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang bertujuan untuk menyederhanakan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Wilayah RT rintisan terdekat pada Kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Program ini diimplementasikan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021 Tentang Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Berdasarkan analisis dan diskusi dari hasil penelitian mengenai implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini masih belum

berjalan cukup efektif di beberapa RT rintisan yang ada di Kelurahan Semolowaru. Salah satu masalah utama yang muncul dalam implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada adalah kurangnya responsivitas dari masyarakat dan juga beberapa pelaksana dalam menjalankan tugasnya, terutama terlihat dari beberapa Ketua RT yang menyalurkan tanggung jawab mereka kepada pihak Kelurahan. Dalam implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Teori ini memanfaatkan enam variabel untuk evaluasi, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana (Disposisi), lingkungan ekonomi, sosial dan politik

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan merupakan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Meskipun tujuan ini sudah jelas, implementasinya masih belum optimal. Evaluasi menunjukkan bahwa target pencapaian Kalimasada belum sepenuhnya tercapai di kelurahan emolowaru kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Program ini diukur berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dan efisiensi proses administrasi yang dilakukan di tingkat RT dan RW. Meskipun program ini menunjukkan kemajuan, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam hal layanan administrasi kependudukan dan layanan RT rintisan yang kurang efektif. Sebagai contoh, sebagian besar penduduk lebih memilih mengurus administrasi kependudukan secara langsung di Kantor Keluraan daripada melalui layanan RT rintisan Kalimasada, hal ini mengurangi efektivitas program tersebut.
- b. Sumber Daya yaitu sumber daya, pada sumber daya di Kelurahan Semolowaru yang mencakup sumber daya manusia, yaitu dalam program ini, sumber daya manusia dianggap memadai dan kompeten. Para pelaksana, yang terdiri dari pegawai kelurahan, anggota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta Ketua RT, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas layanan administrasi kependudukan. Sumber daya manusia tersebut dilatih untuk memahami prosedur administrasi kependudukan dan dapat berinteraksi dengan masyarakat secara efektif. Pelaksana menunjukkan sikap proaktif dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program ini. Sumber daya dana, yaitu alokasi dana menjadi salah satu kendala dalam implementasi program ini, pengalokasiannya tidak selalu jelas terkadang, dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan operasional, sehingga pelaksana harus mencari cara lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, gaji yang diberikan kepada pelaksana hanya sebatas gaji RT saja, yang dianggap kurang memadai mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang di tanggunginya. Sumber daya waktu memainkan peran penting dalam kemajuan program. Pada sumber daya manusia dianggap cukup

memadai, masih ada kekurangan dalam sumber dana yang berhubungan dengan sarana dan prasarana di Balai RW seperti tidak adanya web cam yang terhubung dengan aplikasi KNG serta komputer yang seringkali bermasalah. Hal ini menyebabkan keluhan dari warga terkait kecepatan pelayanan yang lambat. Selain itu sumber daya waktu juga perlu ditingkatkan dalam implementasi Kalimasada.

- c. Karakteristik Pelaksana yaitu karakteristik badan/instansi pelaksana merupakan para agen pelaksana dari Kelurahan Semolowaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta Ketua RT rintisan menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengelola administrasi kependudukan. Mereka telah menerima pendidikan dan panduan yang memadai terkait Kalimasada dan aplikasi Klampid New Generation yang berkontribusi pada peningkatan layanan masyarakat.
- d. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana menjadi aspek penting kelancaran implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan sikap positif dan motivasi yang tinggi dari para pelaksana sangat dibutuhkan oleh warga khususnya Kelurahan Semolowaru dalam layanan administrasi kependudukan. Koordinasi dan komunikasi antara pihak Kelurahan, DispendukCapil Kota Surabaya dan juga RT rintisan relatif efektif, meskipun terdapat beberapa RT yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan responsivitas warga. Komunikasi melalui grup WhatsApp dan pertemuan langsung menjadi metode yang umum digunakan untuk memastikan informasi terkait implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada tersampaikan dengan baik.
- e. Sikap /kecenderungan para pelaksana (Disposisi) sikap positif dan profesional dari pelaksana, baik dari staff administrasi kependudukan maupun ketua RT rintisan, berperan penting dalam kesuksesan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada, meskipun terdapat tantangan terkait responsivitas beberapa Ketua RT di RT 03 RW 09, RT 01, RW 11 dan RT 03 RW 12 masih kurang responsif terhadap implementasi Kalimasada serta ketidakpatuhan dari masyarakat terkait dokumen administrasi kependudukan. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi aktif masyarakat.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik warga Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, kota Surabaya mempengaruhi respons terhadap implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada. Ditemukan bahwa kondisi lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat berpengaruh pada tingkat responsivitas terhadap Kalimasada. Masyarakat dari lingkungan perumahan besar cenderung kurang responsif karena lebih memprioritaskan pekerjaan daripada urusan administrasi kependudukan. Namun demikian ada juga masyarakat dari lingkungan perumahan menengah tetap kooperatif terhadap implementasi Kalimasada. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi yang relatif tinggi di wilayah Semolowaru mempengaruhi pelaksanaan program, dimana sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja dan menugaskan orang lain untuk mengurus

administrasi kependudukan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang kondusif dapat mendorong keberhasilan program, sementara lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis tentang implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Berikut adalah beberapa saran yang diajarkan oleh peneliti untuk meningkatkan implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya :

1. Memberikan Peningkatan sosialisasi dan pemahaman secara intensif tentang implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya kepada pihak RT rintisan dan masyarakat hal ini mencakup penyelenggaraan pertemuan, workshop terhadap RT rintisan. Sosialisasi secara rinci tentang tujuan program Kalimasada terkait penjelasan program yang akan dilaksanakan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana program tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Memberikan pelatihan dan edukasi secara berkala kepada pemegang akun RT rintisan terkait Kalimasada dan aplikasi KNG dalam prosedur administrasi kependudukan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Kalimasada untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengevaluasi efektivitas dari solusi yang telah diterapkan serta menemukan area perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas terkait sarana dan prasarana khususnya di balai RW dengan memberikan komputer yang berfungsi dengan baik dan webcam yang terhubung dalam aplikasi KNG.
4. Memberikan pendampingan langsung kepada RT rintisan Kalimasada di RT 01 RW 11, RT RT 09 RW 03, RT 12 RW 03 atau jempot bola dalam implementasi Penetapan Perintisan Kalimasada.

Referensi

- SemuaAgindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Dispenduk, S. profil. (2024). *Profil Dispenduk Surabaya*. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/tentang-kami/>
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

- Badan Usaha Milik Daerah, Pub. L. No. 7 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/170602/permen-pan-rb-no-7-tahun-2021>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Romadhona, L. D., & Nawangsari, E. R. (2023). *PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*. 1(2), 1–7.
- Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/318/436.1.2/2021, Pub. L. No. 188.45/318/436.1.2/2021 (2021). <https://jdih.surabaya.go.id/>
- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- Widyaningtyas, D. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Program Cedak Mas Pada Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) IMPLEMENTATION OF POPULATION POLICY (Study on the Cedak Mas Program on KTP-el Making Services in Kenduruan Distric*. 1, 151–165.